

ESPOSITO DAN KAPITALISME DI BUMI ISLAM

Kajian Hak Milik Pribadi, Privatisasi dan Intervensi
Negara, serta Kesenjangan Buruh-Majikan

Maghfur Ahmad

Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan
maghfurahmad@yahoo.com

Abstract: This research study Esposito views about Islam's rejection of capitalism. Background of this study is his book *What Everyone Needs to Know About Islam*, section "why does Islam reject capitalism?". Given the very broad spectrum of topics capitalism, then this study focused on the key issues of private property rights, privatization and state intervention and worker-employer gap Islamic perspective . Research literature indicates that Islam is a middle way between capitalism and socialism. Capitalism recognizes private property without limit, Islam restrict individual ownership, collective ownership of resources is not guaranteed and exclusive ownership. Principle of capitalism are competition, free markets and individual competition without limits, Islam allows the state to intervene economic, market and business, in order to keep harmony, continuity and shared prosperity. Therefore, Islam recognizes the principle of property rights of rich people on poor people. There is the social responsibility of the state, rich people, and the employer, capitalism does not require otherwise.

Kata Kunci: Hak Milik, Privatisasi, Intervensi Negara, Relasi Buruh-Majikan, Pasar Bebas

PENDAHULUAN

Kapitalisme, hingga detik ini masih menjadi daya tarik dan tetap survival, bahkan menjadi arus besar dalam perjalanan peradaban. Daya tahan yang sedemikian dahsyat ini, membuat Francis Fukuyama, menyebutnya sebagai *the end of history*. Bukan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa penting terjadi, melainkan prinsip-prinsip kapitalisme telah menyediakan jawaban atas semua problem kehidupan umat manusia (Fukuyama, 1992). Kajian yang dilakukan oleh John L. Esposito mengenai kapitalisme sungguh menarik dan relevan dengan kondisi

kekinian. Pertanyaan pokok yang dilontarkan Esposito, mengapa Islam menolak kapitalisme? Apakah Islam dan kapitalisme kompatibel?

Esposito melakukan kajian secara reflektif. Dalam studi awal, argumen yang dia kemukakan tidak disertai dengan data-data yang akurat dan valid. Namun secara lugas Esposito menjelaskan argumen penolakan Islam dan kaum muslim terhadap kapitalisme. Menurutnya, paling tidak ada beberapa alasan, yaitu kapitalisme mengganggu prinsip-prinsip individu dan kebebasan dalam berbisnis yang bermuara pada keuntungan dan kepemilikan hak individu. Kapitalisme telah membawa sisi gelap pasar bebas, minimnya perhatian pada kaum miskin dan marjinal, meningkatnya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, terancamnya identitas dan nilai-nilai Islam.

Basis kajian ini adalah pandangan Esposito dalam *What Everyone Needs to Know About Islam*, terkait kapitalisme berikut.

“Why does Islam reject capitalism?”

Islam has no problem with many of the essentials of capitalism. It is important to remember that Muhammad, the preeminent model for all Muslims, was a prosperous businessman who engaged in financial and commercial transactions to make a living and that his earliest followers included successful merchants. The Quran as well as Muslim historical experience confirms the right to private property, trade, and commerce.

Mosques throughout the world, like the Ummayyad mosque in Damascus and the grand mosques in old Cairo and Tehran, are often adjoined by magnificent bazaars. Traders and businessmen constituted one of the most successful sectors in Muslim society and were often responsible for the spread of their faith.

Capitalism exists both in its homegrown forms in the Muslim world and in Western-inspired versions. However, many in the Muslim world, like many in other parts of the world, are concerned about the dark side of capitalism, the possible abuses of a free market economy including the seeming lack of concern for the poor and weaker sectors of society. More specifically, they fear forces of the globalization will lead to greater Western economic penetration in Muslim countries. The result, they fear, will be continued Muslim dependence on the west and a free market economy that is geared only toward maximizing profits, which may increase the growing gap between rich and poor. Finally, they fear a contagious ideals and threaten the identity and value of Muslim youth.

However, given an even playing field, perhaps the best response to those who ask whether Islam and capitalism are compatible is to look at the lives of the millions of Muslim who live and work in our midst in America and Europe. Many have come here to enjoy our freedoms and the opportunities offered by our economic as well as our political systems. Like other religious and ethnic minorities before them, they too struggle with

issues of identity and assimilation but not with their desire to enjoy the best that we represent.” (Esposito, 2002: 161-163).

Riset pustaka ini berusaha memahami, membahas dan menganalisis pemikiran Esposito tentang respon umat Islam terhadap kapitalisme. Melalui fokus isu-isu hak milik pribadi, privatisasi dan intervensi negara serta kesenjangan buruh dan majikan, kajian ini berusaha mengkaji argumen-argumen penolakan Islam terhadap kapitalisme.

PEMBAHASAN

Kapitalisme: Konsep dan Perkembangannya

Dari sisi konsep, kapitalisme sebagai ideologi dan paham masih diperdebatkan formulanya. Ada yang berpendapat bahwa kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa batas (<http://id.wikipedia.org>). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah tidak ada lembaga yang boleh melakukan intervensi. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Sebenarnya, kapitalisme tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas oleh khalayak publik. Para ahli membuat konstruksi bahwa kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu. Badan ini dapat menguasai, memiliki maupun melakukan perdagangan benda, barang modal, tanah dan sumber daya manusia.

Paham kapitalisme juga dianggap sebagai sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan atas azas pengembangan hak milik pribadi, penguasaan serta perluasan paham kebebasan. Sebab itu, kapitalisme dinilai sebagai sistem terbaik untuk menghasilkan uang, kekayaan, dan perdagangan bebas dan pasar uang terbuka telah membawa pertumbuhan ekonomi yang tak berbanding untuk sebagian umat (Hertz, 2005: 11-12). Namun juga banyak catatan, kapitalisme ternyata telah banyak melahirkan malapetaka terhadap dunia. Tetapi ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis sosial dan kultural terhadap bangsa-bangsa di dunia.

Kapitalisme dalam sejarahnya adalah sebagai satu bagian dari gerakan individualisme rasionalis (benih-benih liberalisme). Di bidang keagamaan gerakan ini telah melahirkan reformasi, salah satunya Reformasi Gereja oleh Marthin Luther pada tahun 1517 yang memelopori

terbentuknya gereja Protestan sebagai perlawanan atas dominasi Paus di Roma. Sedangkan di bidang pendidikan telah memicu timbulnya Renaissance, yang membawa Eropa ke abad pencerahan. Di bidang politik juga telah menampilkan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, dan terutama di bidang ekonomi telah memunculkan sistem ekonomi kapitalis. Pada perkembangan berikutnya, konsep peradaban kapitalis menjadi legal, sebab di dalam konsep kapitalisme tidak hanya terdapat sistem ekonomi saja melainkan juga suatu cara pandangan hidup. Kapitalisme berkembang subur di Inggris pada abad ke-18, lalu menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Dalam sistem kapitalis hak-hak milik atas alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin dan sumber daya alam), ada di tangan orang perseorangan, bukan di tangan negara.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan *guild* sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

Kapitalisme berkembang seiring dengan dinamika aliran liberalisme. Ideologi ini mensyaratkan ekonomi pasar. Dalam sektor bisnis, peranan negara dibatasi dan peranan swasta diperkuat. Agenda utama kapitalisme yang diusung oleh kaum liberal adalah privatisasi (Ali, 2012: 48). Dari sisi ideologis, varian liberalisme berkembang menjadi dua, yaitu *new liberalism* (liberalisme baru) yang lebih dekat dengan sosialisme dan *neoliberalism* yang mendekati kapitalisme (ekonomi).

Kapitalisme di tangan kaum neoliberalisme ditandai dengan: perkembangan ekonomi yang berkelanjutan adalah fundamental untuk mencapai kemajuan umat manusia; pasar bebas merupakan tempat alokasi sumber daya yang paling efektif; peran minimal intervensi negara baik dalam hubungan sosial dan ekonomi; dan kebebasan perdagangan dan permodalan (Ali, 2012: 48).

Dinamika kapitalisme telah mengantarkan wilayah jelajahnya menjadi beragam. Mulai dari kapitalisme yang tujuan awalnya untuk mengembangkan, menyejahterakan dan membantu sesama; demi kesejahteraan pribadi; hingga sistem kapitalisme yang memupuk akumulasi modal, sampai kapitalisme pro rakyat, yang mengusung semangan sosial (Mustafied dalam Hertz, 2005: vi). Pergeseran dan dinamika kapitalisme itu dapat dilihat dari reformasi internal di tubuh kapitalisme sendiri,

sebagaimana termaktub dalam dinamika pemikiran tokohnya, seperti Adam Smith, Ricardo, Keynes, dan yang lain.

Mengapa Islam Menolak Kapitalisme?

Menurut Esposito, kecocokan Islam dan kapitalisme dapat dilihat dari banyaknya umat Islam hidup dan bekerja di negara-negara Eropa dan Barat. Namun demikian, Esposito juga memahami penolakan Islam dan umatnya terhadap prinsip-prinsip kapitalisme. Penolakan itu berkaitan dampak negatif kapitalisme: bahaya ekonomi pasar bebas, kesenjangan ekonomi antara pemodal dan buruh, globalisas, ketergantungan dunia Islam terhadap barat, eksploitasi demi keuntungan, dan terancamnya identitas budaya Islam.

Pada kajian ini difokuskan pada karakteristik ekonomi kapitalistik di antaranya adalah konsep hak milik dalam kapitalisme; keterlibatan pemerintah yang minim hingga mendorong perilaku ekonomi yang individualis dan pasar bebas; privatisasi dan minimnya intervensi negara dan dampak kapitalisme bagi kesenjangan sosial ekonomi kaum buruh dan majikan.

Hak Milik Pribadi

Hak secara umum dapat dibagi menjadi empat kategori, yakni (1) hak dilihat dari sudut pandang pemiliknya, (2) hak dilihat dari dapat-tidaknya digugurkan, (3) hak dilihat dari dapat-tidaknya diwariskan, dan (4) hak dilihat dari sangkut-pautnya dengan benda materiil (*al-Zuhaili*, tt.: 7). Pada bagian ini penulis akan mengkaji secara khusus tentang hak kepemilikan. Kajian akan membandingkan antar hak milik pribadi yang menjadi ciri khas kapitalisme dengan model dalam Islam.

Islam mengkritisi pengakuan hak milik privat yang tidak terbatas. Pokok penting prinsip kapitalisme adalah mengakui kepemilikan secara pribadi. Kepemilikan pribadi yang diangung-agungkan para kapitalis menemukan jalan buntu ketika dihadapkan pada sebuah kondisi kemiskinan massal. Dalam sistem kapitalisme, fungsi sosial kekayaan sudah hilang. Semangat memupuk kekayaan, modal dan keuntungan yang sebesar-besarnya telah membutakan mata para perilaku ekonomi kapitalis. Kepemilikan privat membawa dampak dan kesenjangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Para pemilik modal besar dengan segala potensinya tak dapat dibendung aktivitas ekonominya. Tentu dengan cara demikian, kaum papa, buruh, pekerja yang tidak punya basis modal dan kapital tidak mampu bersaing untuk merebutkan hak

kepemilikan pribadi. Sehingga jurang perbedaan ekonomi sangat jelas dan gapnya semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini pula yang ditolak oleh ajaran Islam.

Sebaliknya, para sosialis dan kaum egalitarian radikal berpendapat bahwa kepemilikan kolektif adalah segalanya. Hal ini tentu berbeda dengan kaum kapitalisme. Dalam mengakui bahwa manusia adalah berbeda dalam hal kebutuhan. Perbedaan adalah *sunatullah*, karena pada dasarnya semua adalah milik Tuhan.

Nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Quran dan *As-Sunnah*, merespon problem kepemilikan dengan jelas. Kepemilikan individu dibatasi, kepemilikan kolektif dijamin dan sumber daya bukanlah kepemilikan eksklusif. Batas-batas yang jelas dalam Al-Quran dikatakan sebagai jalan tengah memahami persoalan ekonomi akibat sistem kapitalisme yang ada. Dalam Islam perilaku konsumsi manusia juga dibatasi, seperti dalam al-Quran.

Islam merupakan jalan tengah dan moderat. Dalam hal kepemilikan dan penguasaan lahan tidak ada pembatasan yang ketat. Rasul pernah mengatakan bahwa siapa pun yang membuka lahan baru yang belum dimiliki oleh siapa pun maka ia lebih berhak atas lahan tersebut. Namun, apabila tanah itu sudah tidak dikelola secara produktif oleh pemiliknya, sehingga tidak memiliki nilai fungsional dan sosial, maka ia akan kehilangan haknya. Kondisi ini pernah menimpa Bilal al-Harith al-Muzni (Zaman, 1991: 125).

Islam membatasi kepentingan pribadi, dengan batasan-batasan kepentingan sosial. Kepentingan pribadi yang tak terbatas hanya akan merugikan kepentingan sosial. Islam mengajarkan jalan keluar yang baik, hak privat dibatasi melalui intervensi negara. Dalam Islam, kepentingan pribadi tidak selalu merupakan motivasi yang buruk. Kepentingan pribadi akan berbahaya jika dibiarkan tanpa batas atau melampaui norma-norma kemanusiaan. Alangkah baiknya, jika kepemilikan dan kepentingan pribadi diarahkan untuk menciptakan suatu masyarakat yang menjadikan persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi sebagai tujuan akhirnya (Baidhaw, 2007: 95).

Islam mengajarkan tentang persoalan konsumsi manusia. Berkaitan dengan persoalan konsumsi manusia, al-Quran menjawab dengan bijak. Etika Al-Quran mengajarkan pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar, sesuai kebutuhan standar, tidak kurang, namun juga tidak berlebihan. Proporsionalitas menjadi kata kunci berkonsumsi dalam Islam. Prinsip ini tidak dalam rangka membunuh hasrat, menentang materi,

menghentikan konsumsi atau melenyapkan gemerlap citra, melainkan mengendalikan atau meminimalisasi efek-efek destruktif. Segala sesuatu yang bertumbuh ke titik ekstrim atau tanpa batas, seperti jargon kapitalisme, pada akhirnya akan berkembang ke penghancuran diri sendiri (*self destruction*). Ancaman lubang ozon adalah sebuah contoh dari sebuah pertumbuhan ekonomi, industri dan teknologi yang dikendalikan sepenuhnya oleh mesin hasrat kapitalisme (Piliang, 2011: 325).

Islam mengajarkan keseimbangan, kewajaran, dan kesahajaan dalam berkonsumsi. Demikian, prinsip etika konsumsi dalam ajaran Islam. Apabila etika ini diterapkan akan melahirkan perilaku antisipatif dan responsif terhadap ancaman kelangkaan sumber daya alam. Prinsip ini juga akan mampu menekan kerusakan, kemerosotan, dan eksploitasi atas sumber daya alam. Wajar jika saat ini umat manusia disibukkan untuk mencari energi alternatif, setelah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan habis karena pola konsumsi manusia yang rakus, yang disetir oleh pemikiran dan tindakan kapitalisme.

Islam mengajarkan kesahajaan dalam membelanjakan, berkonsumsi, dan mentasarufkan harta untuk berbagai kepentingan; makan, infaq, hadiah, waris, atau investasi. Berikut diagram batasan-batasan berkosumsi, seperti formula (Baidhawiy, 2007: 155).

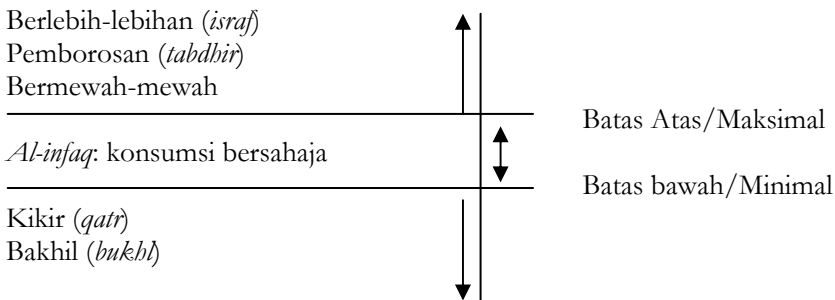


Diagram tersebut mengilustrasikan pentingnya batasan dalam berkonsumsi. Prinsip ini juga mengkritik model konsumsi yang dikembangkan oleh kapitalisme. Kapitalisme mengajarkan kebebasan individu untuk memenuhi hasratnya tanpa batas-batas kelayakan menurut tatanan nilai dan sosial.

Bagi masyarakat kapitalisme, hak milik pribadi dapat digunakan sesuai dengan keinginan, hasrat, dan pemuasan individu tanpa harus melihat dan mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar. Hal ini berbeda dengan konsep Islam. Dalam harta pribadi ada hak sosial fakir

miskin. Konsumsi individu dibatas dan dikendalikan oleh kebutuhan dan kewajaran sosial. Dengan demikian, melalui pola konsumsi yang bersahaja (infaq), Islam membuat rambu dan batas-batas yang proporsional, agar ada keseimbangan kosmos, perilaku dan tata hidup yang harmoni antar manusia, alam dan semesta.

Sejarah Islam telah mengetengahkan bahwa nabi dan para sahabatnya, adalah saudagar-saudagar profesional. Mereka mencari keuntungan melalui bisnis dan kerja keras dengan semangat inovatif dan produktivitas yang tinggi. Kinerja ini dilakukan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan keuntungan pribadi, melainkan juga demi kepentingan sosial, agama dan masyarakatnya. Dalam aspek ini perilaku bisnis nabi dan sahabat, dekatnya masjid dengan pasar, sebagai alasan kecocokan Islam dan kapitalisme, sebagaimana yang disampaikan oleh Esposito sungguh tidak mendasar.

Aktivitas ekonomi yang dilakukan nabi, shahabat dan kaum muslim sungguh berbeda dengan agenda kapitalisme yang ingin memupuk secara eksploitatif modal dan kapital. Dalam Islam semangat bisnis, bekerja dan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan spirit filantropi sosial dalam rangka ibadah demi meraih ridha Allah.

Privatisasi dan Mengisolasi Peranan Negara

Sistem kapitalisme mengajarkan bahwa peranan negara harus dibuat seminimal mungkin. Intervensi negara dieliminir sedemikian rupa sehingga tidak dapat membatasi pihak pribadi dan swasta untuk menjalankan perdagangan, produksi, demi memperoleh laba semaksimal mungkin. Melalui privatisasi aset, barang dan modal milik negara, pihak yang berkapital besar dapat meraup keuntungan yang tidak terbatas. Apabila semua sektor usaha negara diprivatisasi, maka monopoli perdagangan dan usaha menjadi hal yang lumrah. Sehingga kewajiban Negara mensejahterakan rakyatnya menjadi utopis. Belum lagi benturan dengan sistem hukum yang dibuat untuk kepentingan para kapitalis.

Peran negara sebagai alat kontrol tidak dikenal dalam dunia kapitalisme. Minimnya peranan negara dalam kehidupan perekonomian rakyat berawal dari dialog menteri keuangan dengan pembesar Prancis. Suatu saat Jean Baptiste Colbert, Menteri Keuangan Prancis pada masa pemerintahan Louis XIV pada akhir abad ke 17 bertanya “bagaimana kiranya pemerintah dapat membantu dunia usaha? Legendre menjawab: ‘*Laissez-nous faire*’ (jangan mengganggu kami; *leave us alone*), kata ini kemudian hari dikenal sebagai *laissez faire*. Prinsip *laissez faire* diartikan

sebagai tiadanya intervensi pemerintah sehingga timbullah individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi.

Tentu hal ini sangat ditolak dalam Al-Quran yang berprinsip pada keadilan masyarakat seutuhnya, menolak adanya penguasaan pribadi terhadap sumber daya alam, baik yang bebas maupun yang tidak. Berkaca pada sejarah. Nabi sebagai pemimpin pada jamannya telah melakukan langkah nasionalisasi sumber daya alam seperti hutan, air, dan rumput demi kepentingan publik. Tidak diijinkan segelintir orang untuk menguasainya, apalagi jika kepentingannya hanya sekedar akumulasi modal dan kekayaan.

Pemimpin sekarang perlu meneladani kebijakan yang dibuat oleh Nabi. Pemimpin punya otoritas untuk membuat kebijakan agar rakyat dapat memperoleh manfaat dari kekayaan sumber alam, yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya. Fakta yang terjadi sekarang justru sebaliknya, pemimpin berlomba-lomba melakukan privatisasi aset-aset publik. Negara melalui aparatur-aparaturannya, dikendalikan oleh pemilik modal untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan para pengusaha. Kebijakan privatisasi merupakan contoh riil keberpihakan negara terhadap pemodal.

Aset negara yang sudah dikuasai pemodal asing (privatisasi) antara lain, BRI, BNI, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Perusahaan Gas Negara, PT Asuransi Kredit Indonesia, Tekonsel, Bank Mandiri, PT Angkasa Pura, PT Kimia Farma, dan lain sebagainya. Selain melalui privatisasi atau swastanisasi, korporasi raksasa juga secara agresif mendorong deregulasi dan liberalisasi perdagangan. Melalui organisasi perdagangan multilateral (WTO), kapitalisme global hendak menjangkau semua bidang perdagangan, jasa dan HAKI (Mustafied dalam Hertz, 2005: xi).

Negara seolah-olah tak berdaya dalam kepungan para kapital. Penguasaan terhadap sumberdaya alam dan manusia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional (modal besar), kerjasama dengan kapitalis lokal, untuk mempengaruhi kebijakan negara. Seiring maraknya kapitalisme global, kekuatan bisnis dalam beberapa hal mengambil alih kekuasaan negara. Kuasa bisnis telah menggurita, menggantikan kuasa negara. Penguasa bisnis, lebih berpengaruh daripada pengelola negara. Bahkan, kini pemilik-pemilik modal dalam mengeksekusi kebijakan publik jauh lebih berkuasa daripada negara (Khor, 2002: 13).

Idealnya, atas nama kemakmuran rakyatnya, Negara harus mengendalikan aset-aset yang berharga. Barang-barang yang menjadi

hajat hidup rakyat banyak harus dijamin keberlangsungannya. Air, tanah, hutan, lautan, energi dan bahan bakunya serta aset-aset strategis yang lain harus dilindungi dari jarahan para pemodal besar. Aset strategis ini tidak dapat diprivatisasi. Pemimpin harus berani memproteksinya demi kepentingan nasional. Hanya dengan melalui mekanisme tersebut, pintu bagi para kapitalis lewat korporasi trans-multinasional akan tertutup rapat. Demi kesejahteraan rakyatnya, Islam mengabsahkan negara untuk ‘memonopoli’ sumber daya alam. Demi kemakmuran rakyatnya, negara harus diambil kebijakan yang mampu memproteksi dan melindungi hajat hidup orang banyak. Hanya melalui langkah ini, negara dapat dinilai menjalankan fungsinya sebagaimana fungsinya.

Dalam Islam, intervensi negara diperkenankan dalam rangka membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan, menghentikan eksploitasi dan menjamin kesejahteraan publik. Pemerintah punya tanggung jawab untuk meningkatkan produksi dan distribusi kekayaan dan pendapatan. Di sisi lain, pemerintah tidak diperkenankan melakukan pembiaran atas gaya hidup mewah, boros dan konsumerisme sebagai tujuan hidup rakyatnya. Dalam konteks ini ada tiga peran penting negara dalam melakukan intervensi aktivitas ekonomi, yaitu menyangkut pemilik dan produsen, redistributor kekayaan dan pendapatan, serta regulator kehidupan perekonomian.

Negara memegang mandat kepemilikan publik atas segala hal yang menjadi hajat hidup rakyatnya. *“Dia Allah yang telah menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu”* (QS. Al-Baqarah, 2: 29). Ayat ini menunjukkan bahwa sumber daya alam, baik berupa barang-barang yang tersedia di lautan maupun daratan dan udara, seperti sumber mata air, ruang angkasa, sumber daya laut, hutan dan barang tambang di perut bumi dan lain sebagainya merupakan hak semua anggota masyarakat. Ayat tersebut memberi mandat pengelolaan sumber daya alam secara kolektif. Tanggung jawab seperti ini hanya dapat dikelola melalui manajemen ekonomi di bawah kendali negara. Melalui negara sebagai pemilik dan produsen, kekayaan alam sebagai aset-aset publik diproses, dikelola dan dikembangkan untuk didistribusikan demi kesejahteraan bersama. *“dan hendaklah kamu mendirikan sebuah institusi yang bertugas menjadi penjaga gawang kebaikan, menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkarannya. Institusi semacam inilah yang menjamin kesejahteraan bagi semua orang”* (Ali Imran, 3: 104).

Negara mestinya kuat dan tidak boleh berada dalam subordinasi para kuasa kapital. Dengan cara itu, negara dapat menjalankan fungsinya

sebagai penjamin hak-hak dasar rakyatnya. Sebab itu, negara harus otoritatif untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam sebagai aset bersama. Pemerintah dituntut mengelola kekayaan negara dan mampu menjamin terselenggaranya kehidupan yang berkeadilan, terjaminnya hak-hak dasar rakyat serta dapat membangun kesejahteraan umatnya.

Dalam konteks perekonomian, intervensi negara bersinggungan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Negara harus mampu mengelola sumber daya alam milik bersama demi kepentingan publik yaitu jaminan hidup, aman, damai, adil dan sejahtera. Negara harus bisa memerankan fungsinya --meminjam bahasa Imam al-Syathibi (730 H-790 H) sebagai institusi yang menginisiasi *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*, mengambil kemaslahatan dan menghindari kerusakan tatanan ekonomi. Sebab itu, intervensi negara dalam bidang bisnis tetap dalam koridor politik ekonomi populis, yaitu *tasharruful imam'alarra'iyah (al-igtisbadiyyah) manuthun bil mashlahab*. Kebijakan pemerintah terhadap persoalan ekonomi rakyatnya harus berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Pandangan Islam tersebut berbeda dengan cara pandang kapitalisme. Kapitalisme memproklamirkan bahwa intervensi negara baik dalam hubungan sosial dan ekonomi harus ditekan (Ali, 2012: 49), untuk melapangkan jalan bagi cukong-cukong melalui mekanisme 'kompetitif' dan dalih pasar bebas untuk 'mengeruk' laba tanpa batas demi hasrat dan nafsu individualistik. Pola pikir yang demikian ditentang dalam Islam. Dalam sejarah Islam pernah terdapat lembaga *hisbah*. Hisbah, sebuah departemen inspektorat yang bertugas mengawasi dan menghentikan segala bentuk pemalsuan, kecurangan timbangan, manipulasi, monopoli, kerja melampaui jam kerja, supervisi industri, supply dan pembagaian kebutuhan, supervisi perdagangan, dan seterusnya. Dalam konteks ini negara merupakan institusi *checks and balances* (Baihawy, 2007: 242; Islahi, 1988: 186-191). Di negara-negara yang menganut ajaran kapitalisme, negara dikebiri agar tidak memiliki peran-peran untuk menyejahterakan rakyat. Dengan cara demikian, maka pihak pengusaha leluasa mengeruk kekayaan tanpa ada pihak yang merintang. Prinsip *laissez faire* diartikan sebagai tiadanya intervensi pemerintah memiliki dampak bagi lahirnya kebebasan ekonomi yang individualis. Model perekonomian seperti ini ditentang oleh nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, berbeda dengan kapitalisme, Islam membolehkan negara melakukan intervensi ekonomi, pasar dan bisnis, demi

terjadinya keseimbangan, keberlanjutan dan kemakmuran bersama, tanpa mengurangi keragaman potensi, kinerja, dan prestasi individu.

Kesenjangan Buruh dan Majikan

Esposito mengatakan salah satu alasan Islam menolak kapitalisme adalah sistem ekonomi kapitalisme membawa dampak pada kesenjangan dan minimnya perhatian terhadap kaum miskin (Esposito, 2002: 161-163). Temuan Esposito memang sudah menjadi rahasia umum, bahwa dampak dari kapitalisme akan melahirkan akumulasi kapital yang tanpa batas. Kapitalisme telah mendorong pihak pengusaha, sebagai juragan menjadi 'buta secara sosial.' Mansour Fakih mensinyalir bahwa kapitalisme sebagai ideologi yang bertujuan melakukan pemupukan modal (*capital accumulation*) melalui proses-proses investasi, pada hakikatnya merupakan praktik yang mendorong terjadinya ekspansi dalam bentuk penguasaan pasar, pasokan bahan baku, dan tenaga kerja semurah mungkin (Fakih dalam Dietz, 2005: vii).

Sebagai ideologi yang sangat tergantung pada tiga pilar, yaitu sumberdaya alam, manusia, dan finansial, maka kapitalisme tidak segan-segan melakukan berbagai praktik yang merusak, dan memeras keringat buruh demi memenuhi kebutuhan produksi. Berawal dari eksploitasi alam demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, pada gilirannya sumber daya alam semakin berkurang, bahkan pada akibat selanjutnya akan melahirkan krisis dan kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, sendi-sendi kehidupan sosial juga akan rusak yang disebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, politik dan budaya antar yang kaya (majikan) dan yang miskin (buruh).

Relasi buruh majikan dalam sistem kapitalisme tergambar dari kesenjangan ekonomi keduanya. Kaum buruh sering diposisikan sebagai bagian dari sistem produksi laksana mesin mesin pencetak uang. Model hubungan yang demikian pada akhirnya memposisikan majikan sebagai subyek dan buruh sebagai obyek yang dieksploitasi. Relasi seperti ini bertentangan dengan model yang diajarkan dalam Islam. Islam menggunakan prinsip hak dan kewajiban dengan tetap mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan.

Rasulullah mengajarkan etika seorang majikan (pengusaha) dalam memperlakukan pekerja atau buruh. Dalam sebuah sabdanya, beliau berkata: "*Barang siapa mengangkat seorang buruh, jika ia tidak mempunyai rumah maka harus dibikinkan rumah; jika belum menikah maka harus dinikahkan; jika tidak mempunyai pembantu maka harus dicarikan*

pembantu; jika tidak mempunyai kendaraan maka harus diberikan kendaraan. Jika majikan tidak memberikan hal tersebut, ia adalah pembunuh.” (HR. Ahmad).

Hadits tersebut dapat dipahami bahwa relasi buruh dan majikan tetap dalam koridor yang proporsional. Masing-masing pihak saling membutuhkan dan punya hak dan kewajiban yang setara. Nilai lebih yang dihasilkan dari usaha atau kerja harus dinikmati bersama. Majikan dan buruh tidak boleh ada yang merasa dieksploitasi. Sebab itu, Nabi mengajarkan seorang majikan harus peduli pada kebutuhan dasar buruh. Seperti sandang, papan dan pangan bahkan pasangan hidupnya. Kebutuhan pokok buruh tersebut harus menjadi tanggung jawab majikan.

Prinsip kesetaraan dalam Islam tersebut berbeda dengan model kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, kaum buruh cenderung dieksploitasi. Mereka diperas tenaganya untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai nilai lebih (*surplus value*) (Jalil, 2008: 69-71). Akan tetapi nilai lebih itu tidak kembali kepada buruh, tetapi kembali kepada pengusaha (kaum kapitalis). Dalam hal ini buruh hanya menerima upah tertentu dari majikannya, dan upah tersebut sama sekali tidak mempresentasikan pembagian keuntungan dari nilai lebih yang diperoleh pihak perusahaan.

Ironisnya, resiko pertama akibat ulah pengusaha untuk ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya justru ditanggung oleh kaum buruh. Jika sedikit saja ada guncangan pada perusahaan mereka akan dikurangi. Dalam iklim usaha yang seperti ini, salah satu ukuran manajemen usaha yang baik adalah jika mampu menekan jumlah buruh usaha sedikit mungkin namun dengan kesetiaan dan keterampilan kerja yang tinggi. Buruh yang sedikit kurang ahli dan kurang setia harus dicarikan penggantinya, dan kalau perlu dengan mesin robot atau sejenisnya. Akibatnya, jumlah pengangguran terus bertambah, dan secara politik, posisi kaum buruh semakin lemah. Dengan dihantui oleh perasaan khawatir akan diberhentikan, yang kemudian berimplikasi pada nasib keluarga mereka, para buruh dipaksa untuk menerima nasib sebagaimana adanya.

Bagi para juragan kapitalis, pengurangan jumlah buruh ternyata juga dianggap belum cukup menjamin keuntungan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, dengan mengatasnamakan efisiensi, jam kerja kaum buruh pun harus dicanangkan sepanjang-panjangnya. Mulai pagi buta hingga tentang malam orang harus memeras pikiran dan tenaga, menghitung angka dan melayani mesin, untuk memenuhi ambisi majikannya.

Kondisi probelamatik perburuhan di negara-negara kapitalis secara lebih gamblang digambarkan Gramsci. Menurut Gramsci, dalam negara kapitalis ada beberapa lapisan. Lapisan yang tertinggi adalah negara/pemerintah atau aparat-aparatnya, kemudian dibawahnya ada kaum kapitalis, di bawahnya lagi ada buruh, sedang yang paling bawah adalah petani. Petani adalah golongan masyarakat yang memproduksi pangan untuk menghidupi para buruh dan masyarakat lainnya. Sementara itu, buruh bekerja untuk kepentingan golongan kaum kapitalis dalam upaya untuk terus meningkatkan produksi dan sekaligus mengembangkan modalnya (Gramsci, 2001: 64-68).

Demi meningkatkan produksi, kaum kapitalis melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh. Akan tetapi, mereka tidak akan mampu melakukan eksploitasi tanpa adanya dukungan dan perlindungan dari pihak negara/pemerintah. Sebagai imbalannya, kaum kapitalis membayar pajak kepada negara yang digunakan untuk membiayai aparat-aparatnya. Dalam upaya itu, negara melakukan hegemoni melalui aparat-aparatnya, yang secara umum terdiri dari empat macam, yaitu aparat hukum, militer, pendidikan, dan tokoh agama.

Aparat hukum bertugas memproduksi aturan perundang-undangan untuk menekan dan mengendalikan rakyat (terutama buruh) agar tidak melakukan protes terhadap kaum kapitalis dan negara itu sendiri. Aparat hukum berfungsi sebagai alat hegemoni melalui eksekusi undang-undang, sedangkan aparat militer berfungsi sebagai kekuatan represif yang menindas rakyat dengan cara-cara kekerasan (*repressive state apparatus*). Mereka bertindak secara fisik melakukan pengendalian dan tekanan kepada rakyat agar tetap tenang dan menerima kebijakan negara apa adanya.

Hegemoni melalui aparat hukum dan militer ternyata juga dianggap masih belum cukup dan terlalu vulgar sehingga pemerintah juga berusaha menghegemoni rakyat melalui sarana pendidikan, informasi, dan agama. Melalui aparat pendidikan dan informasi itulah negara melakukan hegemoni kultural dan kesadaran masyarakat (*ideological state apparatus*). Sementara itu, para pengkhotbah dan tokoh-tokoh agama yang lain –melalui ceramah dan khotbahnya- bertugas menggiring kesadaran rakyat pada sikap sabar dan pasrah dengan berharap adanya imbalan dari Tuhan di surga nanti. Agama yang difungsikan seperti ini, sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kaum kapitalis atau kepentingan negara yang lelah menjadi alat bagi kaum kapitalis.

Sementara itu, segala bentuk kebutuhan pembiayaan negara dan aparat-aparatnya diambil dari pajak yang dibayar dari oleh kelompok kapitalis. Jadi, pajak yang diterima oleh negara sebenarnya didistribusikan untuk membiayai keperluan aparatnya, seperti pembelian senjata untuk militer dan biaya operasional lainnya, yang semua itu bekerja untuk melindungi kaum kapitalis, bukan untuk melindungi kepentingan rakyat. Situasi destruktif ini merupakan anomali terbesar dalam sejarah kehidupan umat manusia.

Berkaitan hubungan majikan dan buruh, Karl Marx mengamarkan sisi buram kapitalisme.

“Dalam sistem kapitalis, segala bentuk pertumbuhan produksi mentransformasikan diri mereka sendiri menjadi para pendominasi pengeksploitasi para produsen (pekerja). Mereka hanya menjadikan sebagai potongan-potongan manusia (termutilasi), mereka hanya dijadikan pelengkap mesin-mesin, nilai-nilai manusiawi yang ada dalam hasil pekerjaan mereka dirusak dan bagaikan barang rongsokan. Mereka dijauhkan dari potensi intelektualnya dalam proses produksi, kondisi mereka bekerja didistorsi, para penguasa produksi bertingkah sewenang-wenang dengan segala kelicikannya. Dengan begitu, kehidupan anak-isteri para pekerja juga ditindas oleh roda kapitalisme yang kejam.” (Marx dalam Pals, 2010).

Dengan model relasi tersebut, kesenjangan dalam segala hal antara majikan dan buruh tak dapat dihindarkan. Majikan yang selalu mengejar keuntungan pada gilirannya melakukan pembiaran terhadap kondisi kemiskinan yang dialami para buruh. Melakukan pembiaran terhadap kaum papa jelas dikritik dalam Islam. *“Tabukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak melanjutkan memberi makan orang miskin. Maka cekalah orang-orang yang shalat”* (al-Ma’un, 107: 1-3). *“Sekali-kali janganlah orang-orang yang baik dalam mendistribusikan harta pemberian Allah mengira bahwa kebakhilan itu akan melahirkan kesejahteraan bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu berdampak kemiskinan di kalangan mereka”* (Ali imran, 3: 180). *“Hai orang-orang yang beriman, distribusikanlah sebgaiian kekayaan yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang suatu hari dimana aktivitas perekonomian seperti jual beli, persahabatan dan tolong menolong tidak ada lagi. Dan orang-orang yang kufur (terhadap distribusi) itulah orang-orang yang membahayakan kesejahteraan bersama”* (QS, al-Baqarah, 2: 254).

Dengan demikian, apa yang dikhawatirkan oleh Esposito tentang dampak kapitalisme yang dapat membuat kesenjangan ekonomi yang semakin lebar memang dapat dimaklumi (Esposito, 2002: 161-163). Pada aspek inilah Islam menentang sistem kapitalisme, karena bagi

Islam, dalam harta para majikan atau orang-orang kaya terdapat hak bagi orang-orang miskin dan terlantar. Hal seperti ini tidak dikenal dalam sistem kapitalisme.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut di atas, kajian pandangan Esposito terkait Islam dan kapitalisme dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, menurut Esposito umat Islam menolak kapitalisme karena secara prinsip keduanya berbeda. Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang ditekankan adalah prinsip individualistik, kompetisi, hak kepemilikan pribadi, dan minimnya campur tangan negara. Sedangkan Islam secara prinsip berada antara prinsip-prinsip kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme melahirkan kesenjangan sosial dan runtuhnya identitas-identitas Islam.

Kedua, sistem kapitalisme mengakui hak milik pribadi tanpa batas. Hal ini berbeda dengan prinsip Islam. Kepemilikan individu dibatasi, kepemilikan kolektif dijamin dan sumber daya bukanlah kepemilikan eksklusif. Hak milik dalam Islam merupakan jalan tengah. Islam membatasi kepentingan pribadi, dengan batasan-batasan kepentingan sosial. Kepentingan pribadi yang tak terbatas hanya akan merugikan kepentingan sosial. Bagi Islam, hak privat dibatasi melalui tanggung jawab sosial. Islam berbeda dengan agenda kapitalisme yang ingin mengeksploitasi sumber daya untuk akumulasi modal. Sebaliknya, semangat berbisnis, bekerja dan konsumsi dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kepedulian sosial dengan spirit ibadah.

Ketiga, kapitalisme meminggirkan peran negara. Demi kompetisi, pasar bebas dan persaingan individu yang tanpa batas, negara harus disingkirkan peran sosial ekonominya. Berbeda dengan kapitalisme, Islam membolehkan negara melakukan intervensi ekonomi, pasar dan bisnis, demi terjaganya harmoni, kontinuitas dan kesejahteraan bersama. Sekalipun demikian, Islam juga tetap menghargai berbagai keragaman potensi, kinerja, dan prestasi individu yang dapat menentukan kualitas masing-masing individu.

Keempat, sistem ekonomi kapitalisme yang selalu mengejar keuntungan telah membawa dampak bagi kesenjangan sosial ekonomi. Para juragan yang menikmati nilai tambah memperlakukan buruh hanya sebagai instrumen mengeruk kekayaan. Buruh digaji murah dengan harapan para juragan tetap dapat memperoleh laba yang banyak. Sebab itu, kapitalisme membawa dampak bagi semakin lebarnya jurang status ekonomi si kaya dan si miskin. Kondisi semacam ini ditentang dalam

Islam. Bagi Islam, ada tanggung jawab sosial yang diemban oleh juragan, pengusaha atau orang kaya untuk membantu fakir miskin. Karenanya dalam konsep Islam, dalam harta orang kaya terdapat hak kaum miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi: Gerakan-gerakan Sosial-Politik dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Tt. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2007. *Islam Melawan Kapitalisme*, Yogyakarta: Resist Book.
- Care, Karl E., Ray C. Fair. 1999. *Principles of Economics*. Prentice-Hall.
- Chapra, M. Umar. 1992. *Islam and The Economic Challenge*, Herndon: IIIT.
- Esposito, John L. 2002. *What Everyone Needs to Know About Islam*, New York: Oxford University Press.
- Fakih, Mansour. 2005. "Refleksi Gerakan Lingkungan" dalam pengantar Ton Dietz, *Pengakuan Hak atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*, Yogyakarta: Insist Press.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and the Last Man*, New York: Avon Books.
- Gramsci, Antonio. 2001. "Ekonomi dan Korporasi Negara", dalam *Catatan-catatan Politik*, Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Hertz, Noreena. 2005. *Perampok Negara: Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*, Yogyakarta: Alenia.
- Hollander, Samuel. 1973. *The Economics of Adam Smith*, Toronto: University of Toronto Press.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme>/akses 10 April 2012
- <http://id.wikipedia.org/wiki/keynesianisme>, akses 10 April 2012
- Islahi, Abdul Aziz. 1988. *Economic Concept of Ibn Taimiyah*, London: The Islamic Foundation.
- Jalil, Abdul. 2008. *Teologi Buruh*. Yogyakarta: LKiS.
- Keynes, John Maynard. 2007. *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Olgrave Macmillan.
- Khor, Martin. 2002. *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, terj. AB. Widyanta dan Scholastica Siane, Jakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2002.
- Marx, Karl. 2010. "Agama sebagai Aleniasi" dalam Pals, Daniel L., *Seven Theories of Religion*, Yogyakarta: IRCisod.

- Mustafied, M. 2005. “Ketika Raksasa Ekonomi Dunia Lunglai”, dalam Noreena Hertz, *Perampok Negara: Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*, Yogyakarta: Alenia.
- Pals, Daniel L., *Eight Theories of Religion*, Oxford University Press: 2006.
- Piliang, Yasraf Amir. 2011. *Bayang-bayang Tuhan: Agama dan Imajinasi*, Bandung: Mizan Publika.
- Quesnay, Francois. 1986. *The Economical Table*, New York: Bergman Publishers.
- Vaggi, Gianni. 1987. *The Economics of Francois Quesnay*, Durham North Carolina: Duke University Press.
- Zaman, S.M. Hasanuz. 1991. *Economic Funtion of an Ecomoni State: The Early Experience*, Leicerster: Islamic Funtion.